



**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 MENGENAI PENCABUTAN
DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

RADITYA ARIF NUGROHO
NIM 11000117130305

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 MENGENAI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

RADITYA ARIF NUGROHO
NIM 11000117130305

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,

Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP.196411181993032001

Nur Adhim, SH.MH.
NIP. 196404201990031002

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 MENGENAI PENCABUTAN
DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

RADITYA ARIF NUGROHO
11000117130305

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Juni 2021

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP. 196411181993032001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Nur Adhim, SH.MH.
NIP. 196404201990031002

Dr.IGA Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19740526200604001

Mengensahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui
Kepala Program Studi S1
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP.196411181993032001

Marjo, SH.M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Juni 2021

Nama : Raditya Arif Nugroho
NIM : 11000117130305

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Perjuangan adalah sebuah proses, maka jangan mengandalkan hasil perjuanganmu, tetapi andalkanlah ke ikhlasan Mu dalam berjuang”

(Emha Ainun Najdib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Mahha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*ANALISIS YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 MENGENAI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TANAH SRIWEDARI*”. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis maka perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kkesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1)

3. Prof. Dr. H. Retno Saraswati S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing serta mengarahkan dengan sangat baik dari awal sampai akhir penyusunan.
5. Nur Adhim, SH.MH. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing serta mengarahkan dengan sangat baik.
6. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Keluarga Penulis yang tercinta (Bapak, Ibu dan Adek Brian Adi Kurniawan) atas segala doa dan kasih sayang.
8. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis.

Semarang, 2 Juni 2021
Penulis,

Nama : Raditya Arif Nugroho
NIM : 11000117130305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kedudukan, Wewenang, Tindakan Pemerintah Daerah	12
1. Kedudukan dan wewenang Pemerintah Daerah.....	12
2. Tindakan pemerintah daerah	13
B. Tanah-tanah Bekas Hak Barat dan Ketentuan Konversinya	15
1. Tanah Bekas Hak Barat	17
2. Ketentuan Konversi Tanah Bekas Hak Barat.....	18
C. Pemberian Hak Baru Asal Konversi Hak Barat	21

D. Pengertian Hak Milik, Hak Guna Banguna, Hak Pakai	24
1. Hak Milik.....	24
2. Hak Guna Bangunan.....	29
3. Hak Pakai.....	30
E. Tanah Negara beserta Ruang Lingkupnya	34
1. Pengertian Tanah Negara beserta Ruang Lingkupnya.....	35
2. Terjadinya Tanah Negara.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Metode Penelitian	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	38
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Latar Belakang Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011	
1. Gambaran Umum Tanah Sriwedari.....	42
2. Proses penghapusan tanah Sriwedari melalui gugatan perdata	44
3. Proses penghapusan tanah Sriwedari melalui gugatan TUN	49
B. Legalitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengajukan permohonan Hak Pakai nomor 11 dan 15 sebelum terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011	58
BAB V PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

ABSTRAK

Sengketa tanah hak barat menjadi perhatian lebih terutama bagi praktisi hukum. Seperti kasus antara ahli waris RMT. Wirjodingrat dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam objek sengketa adalah tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* No.295 yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya SK Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN.33/2011 serta memberikan analisis perbuatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sebelum terbit SK Kakanwil BPN tersebut.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1) Surat Keputusan Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN33/2011 diterbitkan karena adanya permohonan pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 dari pemohon ahli waris RMT. Wirjodingrat dan telah diterbitkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Surakarta nomor 530/151/2007. Dasar permohonan pembatalan adalah Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan batal sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta serta memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mencabut kedua sertipikat tersebut. 2) Pemerintah Kota Surakarta tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan Hak Pakai Nomor 11 dan 15. Berdasarkan KEPPRES No. 32 Tahun 1979 dan PERMENDAGRI No.32 Tahun 1979, sepanjang untuk menyelenggarakan kepentingan umum, Pemerintah mempunyai prioritas utama dibanding pihak lain. Penerbitan sertipikat Hak Pakai No.11 dan No.15 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kesimpulannya adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN No.SK.17/Pbt/BPN33/2011 diterbitkan karena adanya permohonan pembatalan sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 dari ahli waris RMT. Wirjodingrat dan telah terbit Surat Kepala Kantor Pertanahan Surakarta nomor 530/151/2007. Pemerintah Kota Surakarta tidak melakukan perbuatan hukum. Penerbitan sertipikat Hak Pakai No.11 dan 15 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : Pembatalan Sertipikat, Tanah Bekas Recht Van Eigendom Verponding.